

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Heru Ungkap Alasan APBD 2023 Turun

Gambir, Warta Kota

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta yang mempertanyakan penurunan APBD Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2023 menjadi Rp 79,52 triliun, dari APBD awal senilai Rp 83,7 triliun.

Heru menuturkan, APBD Perubahan 2023 mengalami penurunan sebesar hampir Rp 5 triliun karena menyesuaikan alokasi anggaran.

"Penurunan ini disebabkan penyesuaian terhadap capaian target pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang lebih realistis," ujar Heru saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Heru menyebut, penyesuaian dilakukan karena target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi, tetapi tidak tercapai.

Oleh karena itu, alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan lainnya.

"Kami mengedepankan layanan perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon," ucapnya.

Pemprov DKI juga fokus pada pemberian bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta bantuan keuangan

bagi pemerintah daerah.

Minta penjelasan

Diketahui anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sunggul Sirait meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan soal APBD Perubahan yang turun menjadi Rp 79,52 dari APBD awal Rp 83,7 triliun.

"Penurunan ini memerlukan penjelasan yang rinci dan transparan dari Pemprov DKI Jakarta. Penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran ini sangat penting," ujar Sunggul saat rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Sunggul menilai perlu penjelasan dari Pemprov DKI mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran.

"Apakah terjadi penurunan pendapatan daerah, efisiensi anggaran, atau apakah ada program kerja Pemprov yang ditunda atau dibatalkan?" tanya Sunggul.

Perolehan Pendapatan Daerah Khusus Jakarta Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 71,07 triliun atau 0,57 persen melebihi rencana yang ditargetkan pada APBD Jakarta yaitu Rp 70,66 triliun.

Kendati demikian, Fraksi PDI-P menilai pencapaian pendapatan daerah itu belum maksimal.

"Banyaknya pengelolaan aset-aset daerah yang belum dikelola dengan baik. Apalagi

kedepannya kita menghadapi Jakarta pasca Ibukota," ujarnya.

Untuk itu, pendataan aset-aset menjadi poin krusial dalam memaksimalkan perolehan pendapatan daerah.

"Bagaimana rencana Pemprov menyasiasi hal ini? Mohon penjelasannya," kata Sunggul.

Sebelumnya diberitakan, dalam laporan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta disebutkan besaran APBD Perubahan DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang disetujui adalah Rp 79,52 triliun.

Angka tersebut turun dari APBD murni DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Rp 83,7 triliun. (faf/m26/Kompas.com)